



Spirit Membangun dari Gorontalo

**Gerakan Nyata dalam Pembangunan
(NDP) dan Embung Wisata Desa**

**AGUS PURBATHIN HADI
HARYONO SUYONO**



Spirit Membangun dari Gorontalo

**Gerakan Nyata dalam Pembangunan
(NDP) dan Embung Wisata Desa**

**AGUS PURBATHIN HADI
HARYONO SUYONO**

**PUSAT DATA DAN INFORMASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

SPIRIT MEMBANGUN DARI GORONTALO

**Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan
Embung Wisata Desa**

Editor : Denny Noviansyah, S.Si, MT
Cover : Baiq Farida Sakinah
Penulis : Dr. Agus Purbatin Hadi
Prof. Dr. Haryono Suyono, M.A., Ph.D

Copyright © 2019
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan atas kerja sama Pusat Data dan Informasi,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,
dan Informasi (BALILATFO) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi,
Republik Indonesia dengan Universitas Mataram
dan didukung oleh
Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Republik Indonesia

TIM KERJA PENYUSUNAN BUKU DATA DAN INFORMASI INOVASI PEMBANGUNAN DESA

Pengarah dan Penanggung Jawab

Anwar Sanusi, Ph.D

Ir. Eko Sri Haryanto, M. Si

Tim Advisory Menteri - Sekretariat Jenderal

Prof. Dr. Haryono Suyono. M.A, Ph.D

Dr.Ir. Muhammad Rizal, M.Sc

Yudha Pawarrangan, S.Kom

Miftahul Khoriyah Al Istiqomah, S.Sos

Kepala Project Implementing Unit (PIU)

Dr. Ivanovich Agusta, SP, M.Si

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Jajang Abdullah, S.Pd, M. Si

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Loan)

Alfandi Pramandaru, ST, M.Si

Bendahara Pembantu Pengeluar (Bendahara Loan)

Zainul Askar, ST

Tim Teknis

Jasnety Umar, Sudonar Budyo, Wuwuh Sarwoaji, Denny Noviansyah, Anton Trisusilo, Agus Hidayatullah, Andy Arifianto, Dian Ayu Permatasari, Evi Gusriyanti, Ichsan Nur Ahadi, Hasanah, Hesti Karunia Wijayanti, Muhammad Adi Saputra, Irda Hayati, Istiqomah, Anugrah Sulistyoyo, Steffany Harwella, Perwira Kasmir, Tya Nadira, Salman Fatahillah, Yoshua Adolf Nauli Sinaga, Indra Catur Prasetyo, Adip Riyadi, , Asriweni Matongan, Riyanto,

Dicky Novriadi, Nanang Fajar Untoro, Widya Amalia, Cipto Santoso, Mega Trisantika.

Tim Administratif

Cindy Dantie Ladya, Septian Rahmadi, Haris Susilo Efendi, Rudi Ruhyadi, Ayu Pratiwi, Lukman Raharjo, Angga Conni Saputra, Firda Shintia Dewi, Nugraha Alfani Natsir, Mega Nabila Ardiana, Dina R Listya Utami, Aulia Putri Andana, Dwi Setiawan, Ifan Hani Triono, Shinta Sabilla, Trianka Priya Utama, Adam Baharidwan, Ibnu Munandar, Inggil Rinekso, Herry Triyanto, Mohammad Arief Putranto, Errie Nurdian Kurnia, Kanigoro, Suryo Pramono, Asriadita Larasati, Martino Yusuf Prasetyo, Andi Nurbianto, Yulianto, Heri Agung Pratomo, Nella Novia Hermawati, Adlan Pribadi, Agus Supriono, Sunaryo, Olivia Ray S, Rico Jusnaiko, Hasanudin, M. Irham, Budi Hermansyah, M Irfan Firmana.

TIM Sekretariat

Arief Setyadi, Bayu Budiandrian, Yudi Zainal Mustopa, Panji Narotama, Ickhsanto Wahyudi , Rinto Himawan, Elfira Rosa Purba.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya, penulisan buku **Spirit Membangun dari Gorontalo, Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa** ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan inspirasi dan pembelajaran dari kepemimpinan lokal Bupati Gorontalo yang turun langsung ke desa-desa untuk memberikan spirit membangun bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam era otonomi dan desentralisasi saat ini, kepemimpinan lokal yang kuat dan mengakar sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di daerah. Pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, mendorong partisipasi dan mengedepankan demokrasi, selalu berinovasi dan mencari terobosan pembangunan, adalah ciri kepemimpinan lokal yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa pemimpin lokal yang kemudian mendapatkan apresiasi di tingkat nasional, seperti Joko Widodo saat menjadi Walikota Solo, Prof Nurdin Abdullah saat menjadi Bupati Bantaeng, dan Bupati Banyuwangi Azwar Annas,

adalah contoh pemimpin local yang memiliki ciri-ciri tersebut.

Kini muncul nama Nelson Pomalingo, Bupati Gorontalo, yang juga dikenal sebagai Bupati yang merakyat, inovatif, dan memiliki program-program percepatan pembangunan di daerahnya. Spirit membangun ini kemudian memunculkan inisiatif, inovasi, dan kolaborasi seperti pengembangan embung wisata di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru. Pembelajaran dari kepemimpinan lokal dan pengembangan embung wisata itulah yang ditulis dalam buku ini.

Buku ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Bupati Gorontalo, Prof Dr. H. Nelson Pomalingo, M.Pd,
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Dr. dr H, Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.
3. Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Dr. Hasim, M.Si
4. Staf Ahli Bupati Gorontalo Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dr. Zaenal Abidin, M.Si.
5. Koordinator Provinsi Konsultan Tenaga Ahli Pendamping Desa Provinsi Gorontalo, Hasan Muhammad, beserta semua Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Gorontalo
6. Kepala Desa Dumadi Kecamatan Telaga Biru, Ketua BUMDes Mombungo, beserta staf desa dan masyarakat Desa Dumadi.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat untuk menjadi referensi bagi para pemimpin lokal dalam mengembangkan spirit membangun bagi warganya,

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

sehingga dapat dilakukan percepatan pembangunan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mataram, Desember 2019
Penulis

Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

*Bismillahirrahmanirrahim...
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Visi Indonesia 2045 adalah Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur yang akan dicapai melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, prioritas utama pembangunan

dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan SDM yang mana menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dapat disebut Visi SDM Unggul, yang tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama, perlu *endowment fund* yang besar untuk manajemen SDM. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan, dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Alinea diatas merupakan Visi Presiden dan Wakil Presdiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang perlu menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Demikian pula Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadikan Visi tersebut sebagai pedoman arah pembangunan desa dan kawasan untuk lima tahun ke depan. Prioritas terhadap pembangunan SDM Perdesaan dimaksudkan agar tersedia SDM Unggul di wilayah perdesaaan Indonesia yang mampu mengelola sumber-sumber daya pembangunan desa secara berkualitas, termasuk Dana Desa. Dengan demikian akan mendorong pencapaian target percepatan pembangunan desa 2019-2024, dimana 10.00 desa tertinggal menjadi berkembang dan 5000 desa berkembang menjadi mandiri. Disisi lain, SDM Unggul di perdesaan juga akan berkontribusi besar terhadap terentaskannya 25 Kabupaten Tertinggal dari 62 Kabupaten Tertinggal pada tahun 2024. Adapun profil pokok SDM Perdesaan (2017) adalah: jumlah angkatan kerja perdesaan sebesar 59 juta jiwa yang hanya 6%

yang berpendidikan tinggi dan 19% berpendidikan sekolah menengah. Jadi, terdapat 70% angkatan kerja di perdesaan yang pendidikannya sekolah dasar dan 5% angkatan kerja di perdesaan yang tidak sekolah.

Cara-cara baru atau inovasi adalah kata kunci bagi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi untuk mengembangkan SDM Unggul Perdesaan agar mampu mengelola pembangunan desa lebih berkualitas. Pengelolaan praktek-praktek inovatif pembangunan desa dalam bentuk buku praktis dapat disebut cara baru karena lebih banyak memanfaatkan proses pembelajaran berbasis studi kasus.

Dengan demikian, langkah Pusdatin untuk menerbitkan 60 Buku Inovasi Pembangunan Desa yang memuat pengalaman atau praktek-praktek inovasi pembangunan desa menemukan momentum tepat. Pelaku pembangunan desa, khususnya di perdesaan akan belajar berbagai kasus atau praktek-praktek inovasi yang mudah ditiru atau dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan konteks desa masing-masing. 60 buku tidaklah banyak, namun perkembangan teknologi saat ini menjanjikan jangkauan luas terhadap akses buku-buku tersebut, seperti juga menjanjikannya manfaat yang luas dari buku-buku tersebut bagi pelaku-pelaku pembangunan perdesaan.

Hidup SDM Unggul Perdesaan!!!!!!.

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Semoga Tuhan Memberkati,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Jakarta, Desember 2019
Kepala BALILATFO

Ir. Eko Sriharyanto, M.Si

**Sambutan Kepala Pusat Data
dan Informasi
Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, dan Informasi
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi**

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala Puji Syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Esa, yang atas karunia dan hidayah-Nya maka penyusunan 60 Buku Inovasi Pembangunan Desa dapat diselesaikan.

Buku Inovasi Pembangunan Desa berisi pengalaman atau praktek-praktek pembangunan desa yang inovatif dalam

memberikan solusi permasalahan-permasalahan di desa. Ruang lingkup inovasi pembangunan desa tersebut berkenaan dengan inovasi pembangunan infrastruktur, inovasi pengembangan Sumberdaya Manusia, dan inovasi pengembangan kewirausahaan desa atau Pengembangan Ekonomi Lokal, termasuk BUMDES.

Inovasi-inovasi pembangunan desa yang dikompilasi menjadi 60 buku ini merupakan inisiasi-inisiasi yang dilaksanakan oleh Unit-Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, PDDT, dan Transmigrasi, yakni: Sekretariat Jenderal, Balilatfo, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP), Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU), Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2Trans), dan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans).

Untuk menyusun buku-buku tersebut Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) bekerjasama dengan 3 anggota Perguruan Tinggi Desa (Pertides), yaitu: Universitas Bengkulu, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Mataram, dimana masing-masing Universitas menyusun 20 judul buku. Adapun Unit Kerja Eselon I yang menyediakan data, laporan, dan informasi pendukung lainnya berkenaan dengan kegiatan inovatif terpilih untuk disampaikan kepada masing-masing Universitas. Tim Universitas juga melakukan kunjungan lapangan di lokasi

terpilih untuk validasi dan melihat perkembangan terakhir dari kegiatan inovatif yang disusun menjadi menjadi buku tersebut. Tentu, banyak pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini, sehingga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Buku yang saat ini berada ditangan pembaca ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran untuk ditiru atau dikembangkan di desa masing-masing dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa di Indonesia ke depan, termasuk pemanfaatan Dana Desa akan semakin berkualitas.

Tidak ada gading yang tidak retak, kekurangan-kekurangan yang ada dari buku ini diharapkan dapat masukan dan pendorong buku-buku inovasi pembangunan desa lainnya yang lebih luas.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Jakarta, Nopember 2019
Kepala Pusdatin

Dr. Ivanovich Agusta, SP., M.Si

**Sambutan Wakil Rektor IV
Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Sistem
Informasi Sambutan Wakil
Rektor IV Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Sistem
Informasi Universitas Mataram**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Salah satu dari program pemerintah yang sudah dilaksanakan pada periode pemerintahan sebelumnya adalah "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" yang bermakna bahwa pembangunan

infrastruktur harus menyentuh masyarakat luas khususnya di kawasan perdesaan. Dampak dari pelaksanaan program ini sudah mulai dirasakan dan kini dengan program pemerintah berupa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tertuang dalam Visi SDM Unggul 2019-2024 dijadikan pedoman arah pembangunan desa dan kawasan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pembangunan SDM Perdesaan merupakan suatu prioritas untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya desa lainnya termasuk pengelolaan Dana Desa.

Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) yang dalam hal ini dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) adalah menerbitkan 60 Buku Inovasi Pembangunan Desa yang memuat pengalaman atau praktek-praktek inovasi pembangunan desa. Program ini merupakan suatu langkah yang sangat baik dan patut mendapat apresiasi. Universitas Mataram sebagai salah satu dari 3 Perguruan Tinggi yang dipercaya untuk terlibat dalam penyusunan 20 buku dari 60 buku tersebut merasa bangga dan mendapat kehormatan yang luar biasa karena berperan dalam menuangkan kisah-kisah sukses dan praktek-praktek inovasi yang tersebar diberbagai desa dalam bentuk buku-buku yang akan dijadikan contoh dan model yang dapat ditiru dan diterapkan oleh desa-desa lain di tanah air sesuai dengan karakteristik desa masing-masing.

Diharapkan bahwa Buku Inovasi Pembangunan Desa yang telah disusun akan memberikan manfaat bagi peningkatan pengetahuan para pelaku pembangunan perdesaan menjadi SDM Unggul Perdesaan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Mataram, Nopember 2019
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem
Informasi Universitas Mataram

Yusron Saadi, ST., MSc., PhD.

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

SAMBUTAN BUPATI GORONTALO



Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Atas berkah rahmat Allah SWT, kami panjatkan puji dan syukur Alhamdulillah. Atas kehadiran-Nya Program NDP (Nyata Dalam Pembangunan) dapat kami laksanakan di Kabupaten Gorontalo.

Program NDP kami laksanakan selain untuk memberikan pelayanan publik hingga ke masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa, menyerap aspirasi masyarakat, juga dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah kecamatan dan desa serta evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dari pelaksanaan Program NDP ini, kami dapat mengetahui secara riil kebutuhan masyarakat, di sektor pertanian misalnya terkait kebutuhan bibit, jaringan irigasi, dll.

Selain itu, Dengan Program NDP kami juga dapat mengetahui berbagai Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk kami dukung dan dorong untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan amanah UU Desa yakni memfasilitasi terciptanya desa-desa di Indonesia yang Demokratis, Mandiri dan Sejahtera.

Besar harapan kami, semoga kehadiran program ini dapat memberikan manfaat bagi rakyat, desa dan daerah Kabupaten Gorontalo.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

Limboto, Desember 2019
BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

...

xxii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	ix
Sambutan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	xiii
Sambutan Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Sambutan Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Mataram	xvii
SAMBUTAN BUPATI GORONTALO	xx
DAFTAR ISI	xxiii
PENDAHULUAN	1
A. Kepemimpinan Lokal dan Desentralisasi	1
	xxiii

B. Pembangunan Daerah Dimulai dari Desa	10
PROFIL KABUPATEN GORONTALO.....	21
A. Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo.....	21
B. Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan.....	28
PROFIL BUPATI GORONTALO	34
A. Panggilan Jiwa Sang Profesor.....	34
B. Sang Konseptor Masa Kini dan Masa Datang	38
C. Sang Bupati Sarat Prestasi	45
SPIRIT MEMBANGUN GERAKAN NDP	50
A. Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) : Pelayanan, Aspirasi dan Evaluasi.....	50
B. Spirit Membangun Gorontalo dengan Tiga Pilar	55
C. Kepemimpinan dengan Tiga Dimensi Keluhuran Budi60	
D. Meningkatkan Kinerja ASN dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	63
MEMBANGUN EKONOMI DESA DARI EMBUNG WISATA	76
DAFTAR PUSTAKA	90

PENDAHULUAN

A. Kepemimpinan Lokal dan Desentralisasi

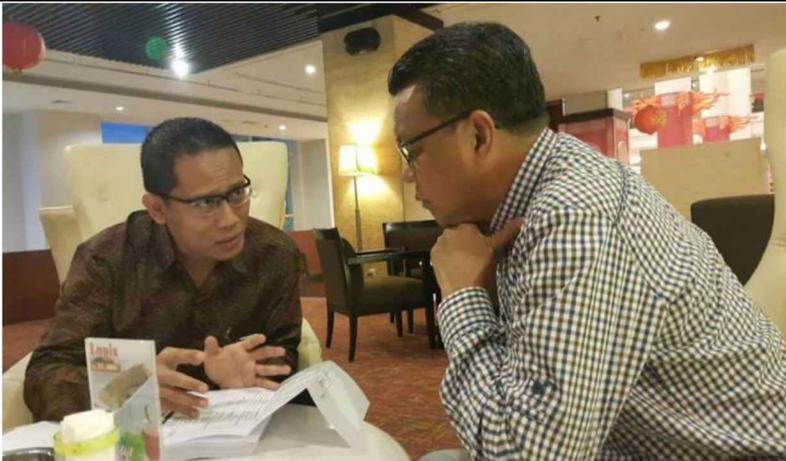
Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengurus dan mengatur pembangunan daerahnya, memberikan keleluasaan bagi Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan pembangunan, melakukan inovasi, dan memberikan nilai tambah terhadap potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Namun demikian, otonomi dan desentralisasi membutuhkan kepemimpinan lokal yang berkualitas, yang mampu memberikan spririt membangun bagi semua warganya.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan tidak serta-merta membuat perubahan mendasar dalam aktifitas pembangunan daerah. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang serius, pelayanan dasar masyarakat tidak secara signifikan membaik, korupsi berkembang sebagaimana ditunjukkan dengan berbagai penindakan kasus korupsi di Kabupaten/Kota yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desentralisasi juga menghadapi masalah birokrasi yang lamban, tidak efisien, dan terkooptasi oleh kepentingan elite lokal. Anggaran pembangunan tidak banyak yang menyentuh kepentingan masyarakat, karena rancangan dan alokasi anggaran pembangunan lebih banyak melayani elit birokrat, pengusaha dan politikus lokal. Bagi daerah yang memiliki sumberdaya alam berlimpah, eksploitasi memicu kerusakan lingkungan hidup. Mandulnya hukum yang berhadapan dengan modal dan berbagai sinisme lain yang terlontar membuat kebijakan desentralisasi dipandang tidak efektif.

Berbagai daerah Kabupaten/Kota yang menunjukkan hasil pembangunan yang mengungguli daerah lainnya, adalah karena Kabupaten/Kota tersebut memiliki pemimpin lokal yang kuat. Contoh kasus yang banyak dibicarakan adalah kepemimpinan Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Dr Nurdin Abdullah, yang berhasil mengubah Kabupaten Bantaeng yang sebelumnya tertinggal menjadi Kabupaten yang maju dan masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan.

“The Hidden Paradise” Buah Karya Bupati Yang Menguasai 5 Gaya Kepemimpinan Sejati



Bupati Bantaeng sedang mendengarkan penjelasan Konsep “5 Pilar Revolusi Mental” dari Hamry Gusman

Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu “The Hidden Paradise” yang ada di Indonesia. Letaknya “agak tersembunyi” karena membutuhkan perjalanan darat sejauh 120 km dari Kota Makassar, atau sekitar 2,5 jam waktu tempuh dengan mobil. Sejak tahun 2008, saat Prof Dr Nurdin Abdullah resmi menjabat sebagai Bupati Bantaeng, maka predikat sebagai kota langganan banjir ini, perlahan-lahan

berubah menjadi daerah bebas banjir, bersih, dan indah.

Kawasan pantai yang kotor dan kumuh, serta penuh semak-belukar, disulap menjadi Pantai Seruni dan Pantai Marina, dengan pusat kuliner, restoran terapung dan lapangan yang mewah dan indah, dengan fasilitas helipad (untuk pendaratan helikopter), dan dilengkapi deretan hotel berbintang yang siap menyambut wisatawan lokal dan mancanegara. Nurdin bukan hanya berhasil mengatasi banjir, kebersihan, dan keindahan lingkungan, tapi ada banyak prestasi lainnya yang berhasil diukirkannya.

Hal ini tak lepas dari keberhasilannya menerapkan lima (5) gaya kepemimpinan sejati, yang merupakan resep utama keberhasilannya dalam membangun Bantaeng. Mari kita ulas satu-persatu.

1. Pemimpin Yang Mau Mendengar Suara Rakyatnya

Bupati yang selalu berpakaian sederhana ini, membuka rumah dinas setiap hari bagi semua warga. Pertemuan dengan masyarakat ini tanpa protokoler yang berbelit. Semua orang bebas bertemu dan menumpahkan masalah dan keinginannya. Beberapa warga mengadukan masalah pribadi dan kesulitan ekonomi. Ada yang meminta uang untuk biaya sekolah anak, bahkan meminta biaya lamaran pernikahan untuk anaknya. Tak jarang Nurdin memenuhi permintaan tersebut meskipun dengan uang pribadinya.

Dan sayapun telah membuktikannya sendiri, lihatlah foto saya bersama beliau diatas. Pada tanggal 25 Januari 2016, saat kami di Makassar, sedang berdiskusi mengenai substansi buku terbaru saya, ternyata beliau mempersilahkan saya terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan isi buku tersebut, serta iapun mendengarkannya dengan seksama tanpa memotong sepotah

katapun, dan kemudian kamipun membahasnya bersama.. Luar biasa.

2. Pemimpin yang Profesional dan Religius

Bupati dengan nama dan gelar lengkap Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M. Agr, adalah satu-satunya Bupati di Indonesia yang bergelar Profesor. Ia menamatkan pendidikan Master of Agriculture, dan Doctor of Agriculture dari Kyushu University, Jepang. Dan sempat menjadi Guru Besar Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Jelas ia sangat menguasai bidang agrobisnis yang kemudian berhasil ia terapkan di Bantaeng. Secara keilmuan, maka sudah “mentok” kecerdasan yang dimilikinya, dan secara spiritual, ternyata Nurdin juga mumpuni. Ia adalah sosok seorang muslim yang sangat religius, bukan hanya dalam tataran ritual (ibadah wajib), namun juga dalam sikap dan kesehariannya, ia begitu konsisten dalam menerapkan nilai-nilai 6 tabiat luhur, seperti menegakkan nilai kejujuran, berjiwa amanah, hemat/tidak boros, menciptakan kerukunan, dapat memelihara kekompakan, dan selalu bergotong-royong (kerjasama yang baik). Selama dua (2) hal itu (profesional dan religius) dapat dipegang teguh, maka tidak ada hal sulit yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang pemimpin.

3. Pemimpin yang Fokus pada Solusi, Bukan pada Masalah

Di bidang kesehatan, angka ibu meninggal akibat melahirkan dari 12.000 per tahun menjadi 0 !!! Karena keberhasilannya dalam meningkatkan layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kini masyarakat cukup menelpon call center 113 untuk mendapatkan layanan Ambulance gratis 24 jam, dengan fasilitas dokter dan tenaga medis dan peralatan yang berstandar Internasional.

Dalam menghadapi suatu permasalahan, Nurdin selalu mencoba menganalisa dan bertanya ; Apa yang menjadi permasalahan utama ? Bagaimana hal itu bisa terjadi ? Dan sederet pertanyaan

lainnya untuk dianalisa secara mendalam, sehingga iapun dapat mengetahui akar permasalahannya, sehingga bisa fokus dalam mencari solusi terbaik.

Sementara tidak sedikit pemimpin yang “lebih memilih” fokus pada masalah, dengan memperpanjang permasalahan, menuntut pidana terhadap pembuat masalah, “menghajar” sekelompok orang yang membuat masalah, atau tindakan tegas/keras lainnya. Namun hal itu sangat tabu bagi Nurdin, karena ia selalu mengutamakan jalan musyawarah dan jalan damai tanpa perlu kekerasan.

4. Pemimpin Berjiwa Konseptor dan Eksekutor

Lebih dari 75 Penghargaan Nasional dan Internasional telah diterima olehnya. Dalam Bidang Pertanian, pria yang berperawakan tinggi ini, berhasil menjadikan Bantaeng sebagai produsen benih berbasis teknologi, dan mengembangkan komoditi unggulan lainnya termasuk talas yang diekspor ke Jepang, Olahan Ikan Surimi yang juga diekspor ke Jepang, bibit jagung manis hasil persilangan jagung manis Jepang dan Bantaeng, serta berhasil mengembangkan pusat agrowisata dengan kebun buah apel, strawberry, manggis, buah naga, durian dan sayuran dataran tinggi.

Salah satu rahasianya adalah ; karena ia selalu memiliki suatu konsep yang telah dianalisa dengan matang, lalu iapun tak segan untuk turun langsung bersama anak buahnya untuk mengimplementasikannya kedalam suatu program kerja nyata. Ya, Bupati yang sangat dicintai rakyatnya ini, adalah seorang konseptor handal, sekaligus juga eksekutor lapangan yang tangguh.

5. Pemimpin Revolusioner

Nurdin juga seorang pemimpin yang revolusioner, yang selalu

dapat merubah sumber daya fisik dan non fisik Bantaeng, secara besar-besaran. Contohnya, ia berhasil membangun Bantaeng Industrial Park seluas 3.000 Ha, tanpa pungutan sepeser pun untuk penerbitan perijinan yang tak lebih dari satu jam atau Free Licenses within one day one Stop Service. Sehingga mega proyek dari PMA Jepang yang berhasil menarik dana puluhan trilyun rupiah tersebut, berhasil menjadi roda raksasa dalam memutar perekonomian Bantaeng, dan tentu saja dapat membuka ribuan lapangan kerja baru.

Ia memiliki karakter yang revolusioner, yang dapat merubah suatu kondisi dan lingkungan, serta mindset dan sikap dari aparatur dan masyarakatnya, dengan waktu yang relatif cepat. Jika semakin banyak kepala daerah dan pejabat negara kita yang memiliki sikap revolusioner, maka lihatlah, Indonesia akan segera menjelma menjadi negara hebat.

Dari berbagai sentuhan pria kelahiran Pare-Pare, 7 Februari 1953 ini, hasilnya angka pengangguran dapat ditekan, dari 12,21% (2008) menjadi hanya 2,4% (2015), angka kemiskinan dari 12,12% (2008) menjadi 5,89% (2015), perekonomian daerah juga tumbuh hingga mencapai 9,2% (2015) bahkan mengalahkan Tiongkok, dan income perkapita warga Bantaeng pun naik dari sekitar Rp. 5 juta (2008) menjadi Rp. 27 juta (2015).!!!

Sungguh luar biasa kiprah “Sang Pemimpin Sejati” ini.

Hamry Gusman Zakaria
Motivator Indonesia

<https://www.kompasiana.com/www.hamrygusman.com/56c144eda5afbd8405df31e3/the-hidden-paradise-buah-karya-bupati-yang-menguasai-5-gaya-kepemimpinan-sejati>

Berbagai daerah Kabupaten/Kota yang menunjukkan hasil pembangunan yang mengungguli daerah lainnya, adalah karena Kabupaten/Kota tersebut memiliki pemimpin lokal yang kuat. Contoh kasus yang banyak dibicarakan adalah kepemimpinan Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Dr Nurdin Abdullah, yang berhasil mengubah Kabupaten Bantaeng yang sebelumnya tertinggal menjadi Kabupaten yang maju dan masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan.

Contoh lainnya Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Bupati inovatif ini mampu melakukan perubahan terhadap Banyuwangi, daerah di ujung timur Pulau Jawa yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan dulu dikenal dengan persepsi kurang elok, kini secara bertahap bertransformasi mencapai kemajuan-kemajuan yang terukur.

Dikelola dengan pendekatan tak lazim alias *anti-mainstream*, Kabupaten Banyuwangi sekarang dikenal sebagai kabupaten terinovatif dengan berbagai gebrakan

pelayanan publik, inovasi sosial seperti Rantang Kasih yang setiap hari mendistribusikan makanan kepada wakga lanjut usia dan pemberian uang saku harian bagi pelajar dari keluarga kurang mampu, akselerasi ekonomi rakyat, juga memelopori Smart Kampung yang memajukan desa, menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menginisiasi Mal Pelayanan Publik, dan bahkan meraih award dari Badan Pariwisata PBB (Anas, Abdullah Azwar, 2019).

Selain dua contoh kepala daerah di atas, sejumlah kepala daerah di Indonesia baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati terbukti memiliki kepemimpinan lokal yang berkualitas. Prestasi dan kontribusi mereka patut disebarluaskan agar menginspirasi daerah lain dalam mengelola pemerintahan yang lebih baik. Salah satunya adalah kepemimpinan Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd, yang akan ditulis dalam buku ini.

B. Pembangunan Daerah Dimulai dari Desa

Setelah desentralisasi di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah memperluas desentralisasi sampai ke tingkat

desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menandakan babak baru bagi kebijakan desentralisasi yang ditujukan kepada desa dan masyarakatnya. Desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi di daerah. Melalui UU Desa, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah hingga berujung pada Pemerintah Desa dapat terwujud.

Desa merupakan ujung tombak dari keberhasilan kebijakan desentralisasi, sebab desa merupakan pranata yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Masyarakat yang akan dilayani dalam proses pembangunan adalah masyarakat yang tinggal di desa dan atau kelurahan sebagai lembaga pemerintahan terdepan. Dengan adanya desentralisasi sampai ke tingkat desa, maka Pemerintah Desa memiliki kekuasaan untuk mengelola segala hal berkaitan dengan desanya, dan akhirnya memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembangunan desa.

Kepemimpinan lokal yang kuat juga dibutuhkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Besarnya

peluang yang diberikan kepada desa untuk mengelola sendiri pembangunan desanya, membutuhkan pemimpin yang visioner, inovatif, pengayom, demokratis namun tegas, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Menurut Ketentuan Umum pasal 1 UU No. 6/2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes diharapkan bukan menjadi lembaga ekonomi yang mengejar keuntungan belaka (*profit oriented*) namun juga menjadi lembaga "penolong" bagi warga yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya (sosial bisnis). Pasal 87 UU No. 6/2014 mengamanahkan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kehadiran BUMDes diharapkan tidak

saja dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa, tetapi juga dapat berperan sebagai salah satu instrumen demokratisasi dan juga instrumen sosial untuk mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal yang saat ini mulai tergerus oleh globalisasi.

Pada Penjelasan Pasal 87 Ayat (1) UU No. 6/2014 tentang Desa dijelaskan bahwa: BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Walaupun bukan kewajiban bagi Desa untuk mendirikan BUMDes, namun mengingat pentingnya lembaga perekonomian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMDes di semua desa yang ada di Kabupaten Gorontalo. BUMDes telah terbentuk di 191 desa di Kabupaten Gorontalo, namun hanya 156 BUMDes yang berjalan atau berkembang, dan baru 5 BUMDes yang dapat dikategorikan maju.

Dari sedikit BUMDes yang terlong maju, kuncinya adalah bagaimana BUMDes mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desanya. Salah satu BUMDes yang fenomenal karena berhasil mengelola sumberdaya alam berupa kolam mata air, adalah BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Umbul Ponggok di desa tersebut, yang semula hanya kolam tempat mandi dan mencuci warga, dibangun menjadi tempat wisata air yang menghasilkan pendapatan sampai Rp 15 milyar di tahun 2018.

BUMDes Tirta Mandiri Menembus Batas

by Dyah Hasto Palupi - April 8, 2018



Barangkali cuma Tirta Mandiri, badan usaha milik desa di Dusun Umbul, Desa Ponggok, Klaten yang popularitasnya menembus batas melebihi intitusinya. Betapa tidak, BUMDes ini menjadi pembicaraan di mana-mana, mulai dari level RT/RW hingga dalam rapat-rapat terbatas para menteri dan Presiden. Bahkan beberapa waktu lalu, Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono dipuji-puji bahkan diajak *selfie* oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran kesuksesannya membangun desanya. Semua mengagumi dan menjadikannya sebagai percontohan.

Didirikan tahun 2009, BUMDes Tirta Mandiri memang menunjukkan perkembangan fantastis. Tahun 2012, pendapatan kotornya masih berkisar di angka Rp 150 juta. Baru setahun kemudian, meningkat menjadi Rp 600 juta. Tahun 2014, melonjak Rp 1,1 miliar. Pada 2015, melebihi target yang ditentukan Rp 3,8 miliar, mencapai Rp 6,1 miliar. Tahun 2016, dari target Rp 9 miliar terealisasi Rp 10,3 miliar. Tahun 2017, mencapai Rp 12 miliar. "Tahun ini kami targetkan di angka Rp 15

miliar,” kata Joko Winarno, Direktur Tirta Mandiri yang berhasil mengembangkan 13 unit usaha, sembilan di antaranya sudah berbentuk PT.

Berkat prestasinya itu, tahun 2017, Tirta Mandiri dinyatakan sebagai pemenang dalam pengelolaan BUMDes terbaik. Ia meraih penghargaan sebagai pemenang kategori Desa Wisata Pemberdaya Masyarakat. Sebuah penghargaan yang diberikan Kementerian Desa PDIT dalam ajang Expo BUMDes Nusantara 2017 di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Tentu bukan pencapaian yang tiba-tiba terjadi. Beberapa tahun sebelum Tirta Mandiri berdiri, Desa Ponggok terbilang masih memprihatinkan. Kehidupan sosial ekonomi sebagian besar penduduknya tercatat berada di bawah garis kemiskinan. Karena itulah, desa yang berada di wilayah Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini menjadi salah satu desa tertinggal dan masuk dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Adalah sosok Junaedi, alumni Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang Kepala Desa Ponggok, yang ingin mengubah nasib desanya dengan mengolah potensi kekayaan alam yang luar biasa. Lokasi desa ini berada di daerah cekungan, memiliki sumber air yang melimpah sepanjang tahun. Dusun Umbul Ponggok sebenarnya merupakan kolam kuno yang sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, selama ini hanya digunakan warga setempat untuk kegiatan mandi. Berkat tangan dingin Junaedi, kolam tersebut disulap menjadi tempat wisata air yang akhirnya *booming* hingga kini.



Joko Winarno, Direktur BUMDes Ponggok

Awalnya, Junaidi yang juga sebagai petani ikan koi, mengaku memasukkan ikan koi yang tidak layak jual ke Umbul Ponggok. Setelah banyak ikan yang hidup di sana, ia mulai berpikir untuk mengembangkannya menjadi destinasi wisata. Tempat wisata ini menjadi perhatian setelah dibagikan di berbagai media sosial sebagai tempat wisata yang *Instagramable*. Pengunjung bisa *selfi* atau berfoto di dalam air merupakan daya tarik utama yang membuat wisatawan terus berdatangan.

Lambat laun Umbul Ponggok menjadi aset ekonomi yang telah mengubah wajah desa. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan yang datang, pendapatan dari tiket masuk juga terus naik. Pendapatan asli desa yang awalnya hanya puluhan juta, kini naik drastis hingga miliaran rupiah. Dan desa yang dulunya miskin ini, kini telah bermetamorfosis menjadi salah satu desa kaya di Indonesia.

Titik balik metamorfosis terjadi saat BUMDes Tirta Mandiri dibentuk dan dipercaya mengelola objek wisata secara

profesional. Banyak warga yang berminat menanamkan modal sehingga ekonomi terus bergulir. “Sekarang, sudah 76% keluarga di Ponggok yang berinvestasi. Nilai investasinya sekitar Rp 5 juta per keluarga. Adapun bagi hasil yang diperoleh berkisar 7-15% per bulan. “Tergantung pada tingkat kepadatan pengunjung,” ujar Junaidi lagi.

“Tahun ini kami targetkan di angka Rp 15 miliar,” kata Joko Winarno, Direktur Tirta Mandiri, kepada semua media. Target berasal selain dari mengelola wisata Umbul Ponggok, BUMDes Tirta Mandiri juga menyediakan kuliner, ritel, penyewaan gedung, rental mobil, biro wisata, dll. Total, Umbul Ponggok masih menjadi motor penggerak ekonomi yang menjadi penyumbang pendapatan terbesar yang jumlahnya mencapai 60%.

Wisata air menjadi magnet yang kuat untuk menarik wisatawan datang. Keunikan yang dimiliki kolam berukuran 50 x 25 m² dan kedalaman rata-rata 1,5-2,6 meter tersebut masih nampak alami dengan dasar pasir halus berbatu dan ikan-ikan yang berenang. Walau dipenuhi ikan, tidak ada bau amis karena mata airnya mengalir deras.

Di tempat ini, wisatawan bisa melakukan *snorkling* dan berfoto dengan aneka gaya. Pengunjung yang tidak memiliki kamera *under water* tidak perlu galau, karena sudah ada jasa penyewaan kamera *under water* dengan fotografernya. Ada pula penyewaan alat dan properti untuk foto. Ada paket foto *prewedding*, paket *diving*, dan paket *power dive (walker)*.

Semua itu kemudian disebarakan melalui media sosial. Tak mengherankan, foto dan video keindahan pemandangan di bawah air itu seketika menyedot perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Dari hasil penjualan tiket dan penyewaan peranti selam air dangkal (*snorkling*), Joko mengklaim pendapatan dari Umbul Ponggok berkisar Rp 500 juta per bulan.

Puncaknya pada libur Lebaran. “Tahun lalu, kami bisa mencapai Rp 1 miliar dalam sepekan,” ucapnya. Dengan berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri, setiap keluarga bisa menerima bagi hasil sekitar Rp 400 ribu-500 ribu per bulan. Dengan pendapatan pasif yang diperoleh dari bagi hasil tersebut, warga Desa Ponggok memiliki tabungan untuk biaya pendidikan anaknya.

Selain warga, sejumlah lembaga di Desa Ponggok juga turut berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri. “Tiap RW berinvestasi masing-masing Rp 50 juta, PKK Rp 100 juta, PAUD/TK juga berinvestasi Rp 25 juta,” ujarnya. Dengan turut berinvestasi, PAUD/TK di Desa Ponggok setiap bulan punya kas Rp 2,5 juta untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Joko menjelaskan, nilai investasi warga dan lembaga masyarakat di Umbul Ponggok saat ini masih di bawah 40% dari total investasi, dari sejumlah pemegang saham. Kendati demikian, Junaedi mengklaim sudah tidak ada pengangguran di desanya. “Lima tahun lalu memang masih ada warga miskin. Sekarang semua penganggur terserap di BUMDes Tirta Mandiri,” tuturnya. Pendapatan per kapita warga di Ponggok sekarang berkisar Rp 1,5 juta-2 juta. Para ibu rumah tangga pun kini turut diberdayakan dengan usaha olahan perikanan.

Berkat BUMDes Tirta Mandiri, kini Desa Ponggok tergolong makmur dan mandiri. Ponggok menjadi salah satu desa yang jadi pusat pembelajaran; menjadi tempat studi banding berbagai institusi yang ingin melihat secara langsung bagaimana praktik membangun desa itu terjadi.

<https://swa.co.id/swa/trends/bumdes-tirta-mandiri-menembus-batas>

BUMDes Mombungo di Desa Dumati, Kecamatan
Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, mendasarkan

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

usahanya pada potensi sumberdaya alam yang ada di desanya. Di Desa Dumati terdapat embung yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II. Embung yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk menampung air, pengendalian banjir, dan sumber air irigasi, dimanfaat BUMDes menjadi tempat wisata.

PROFIL KABUPATEN GORONTALO

A. Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi dengan ibu kota di Isimu. Pada tahun 1978 ibu kota daerah ini dipindahkan di Limboto. Berdasarkan penandatanganan perjanjian ikatan kekeluargaan *u'dulowo lim lo pohalaa* (Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Limboto, Kerajaan Suwawa, Kerajaan Boalemo dan Kerajaan Atinggola), ditetapkan hari lahir Kabupaten Gorontalo pada tanggal 26 November 1673.

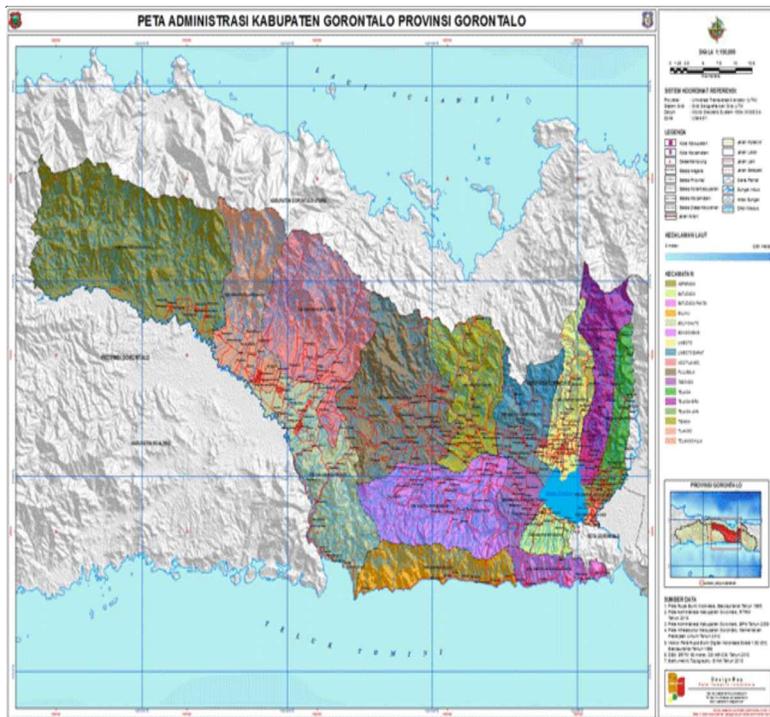
Setelah ditetapkannya Provinsi Gorontalo sebagai wilayah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Desember 2000, daerah ini kemudian secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo telah mengalami tiga kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, pemekaran kedua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango, dan pemekaran terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara.

Geografis. Kabupaten Gorontalo merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut, Gorontalo terletak antara 00.24" - 10.02 Lintang Utara (LU) dan 121².59" - 123^o.32 Bujur Timur (BT). Luas wilayah daratan Kabupaten Gorontalo, adalah seluas 2.125,47 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo



Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Gorontalo

Pada tahun 2017, wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 Kecamatan, Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Limboto, Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Asparaga dengan luas 430, 51 km² atau menempati 20,25 % luas daratan di Kabupaten Gorontalo. Kecamatan yang paling sedikit luas wilayahnya adalah Kecamatan Tilango dengan luas sebesar 5,79 km² atau menempati persentase 0,27 dari total seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo.

Demografis. Penduduk Kabupaten Gorontalo berdasarkan proyeksi penduduk BPS tahun 2017 sebanyak 374 923 jiwa yang terdiri atas 187 301 jiwa penduduk lakilaki dan 187 622 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Gorontalo mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,49 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,62 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,83.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Gorontalo tahun 2017 menurut Dispendukcapil mencapai 186 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per keluarga 3 orang. Kepadatan Penduduk di 19 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tilango dengan kepadatan sebesar 2 586 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Asparaga sebesar 32 jiwa/Km².

Pendidikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2015 sebesar 61,63, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 62,20. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan yaitu dari 3,89 di tahun 2014 menjadi di tahun 3,62 di tahun 2015.

Di tahun 2017 di Kabupaten Gorontalo terdapat 316 sekolah setingkat Taman Kanak-kanak dengan 10 493 murid dan 829 guru. Pendidikan setingkat Sekolah Dasar berjumlah 328 sekolah dengan 45 031 murid dan 2 835 guru. Pendidikan setingkat SMP berjumlah 151 sekolah dengan 20276 murid dan 1555 guru. Pendidikan

setingkat SMA berjumlah 38 sekolah dengan jumlah murid 15 259 dan 1312 guru.

Kesehatan. Pada tahun 2017 jumlah rumah sakit 2 buah, Puskesmas 21 buah, Posyandu 90, dan Poskesdes 72 buah.

Keluarga Berencana (KB) Akseptor KB di Kabupaten Gorontalo di tahun 2017 untuk wanita kawin kurang dari sejumlah 55 564 orang. Jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 70 424 di tahun 2017.

Pertanian. Penggunaan Lahan pada tahun 2017 di Kabupaten Gorontalo mencapai 14 312 hektar. Sebagian besar lahan di Kabupaten Gorontalo digunakan untuk subsektor tanaman pangan, yaitu tanaman bahan makanan yang meliputi tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai, buah-buahan dan sayuran merupakan salah satu sub-sektor pada sektor pertanian.

Di tahun 2017 luas panen padi sawah sebesar 32 189 hektar, padi ladang dengan luas panen 0 hektar atau kecil sekali yang dipanen. Untuk palawija, Luas panen jagung mencapai 94 764 hektar. Sedangkan untuk

komoditi lain, masing-masing dalam hektar: Ubi kayu 6 hektar, ubi jalar 0 hektar, kacang tanah 27 hektar, kacang hijau 1 hektar dan kedelai 85 hektar.

Capaian sub sektor perkebunan di Kabupaten Gorontalo tahun 2017, produksi beberapa komoditi adalah: kapuk 26 ton, dan kelapa 22.812 ton. Sedangkan untuk sub sektor peternakan, jumlah ternak di Kabupaten Gorontalo di tahun 2017 berturut-turut: Sapi potong 85 576 ekor, Kerbau 25 Ekor, Kambing 46 992 ekor, dan kuda 719 ekor. Unggas berjumlah masing-masing: Ayam Buras 501 240 ekor, ayam ras petelur 182 028 ekor, ayam ras pedaging 3 108 600, itik 16.731 ekor dan Puyuh 26 650.

Industri. Jumlah Perusahaan yang ada di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017 sebanyak 3 464 perusahaan yang tersebar di 19 kecamatan. Kecamatan yang mempunyai jumlah perusahaan terbanyak adalah Kecamatan Limboto yaitu sebanyak 443 perusahaan, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah perusahaan paling sedikit adalah Kecamatan Asparaga yang memiliki 44 perusahaan. Sedangkan menurut Klasifikasi Industri,

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

Perusahaan yang bergerak di bidang Pangan sebanyak 1 085 perusahaan, di bidang Kimia dan Bahan Bangunan sebanyak 864 perusahaan, di bidang kerajinan 570 perusahaan, dibidang Sandang 769 perusahaan, dan dibidang Logam dan Elektronika sebanyak 176 perusahaan.



Gambar 2. Lambang Kabupaten Gorontalo

B. Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan

Rumusan visi Kabupaten Gorontalo adalah :

"Kabupaten Gorontalo Gemiliang untuk

mewujudkan masyarakat madani'. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah :

1. Menciptakan SDM Cerdas, Sehat dan berkarakter
 - Terciptanya SDM cerdas dan Sehat
 - Terciptanya SDM yang berkarakter kompetitif
 - Terbangunnya sinergitas antar institusi pemerintahan
 - Terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik
 - Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan
2. Memantapkan Pemerintahan yang harmonis, bersih, dan dinamis
 - Meningkatnya kondisi ekonomi wilayah
 - Berkembangnya sector sektor unggulan daerah
 - Menguatnya ketahanan pangan daerah
 - Kuatnya Daya Dukung Infrastruktur Wilayah
3. Mengoptimalkan sumberdaya alam menuju kemandirian
 - Integrasi kependudukan dengan kebijakan pembangunan

- Penciptaan Lingkungan yang Lestari
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan hidup
 5. Melakukan kerjasama global untuk pembangunan daerah

Kabupaten Gorontalo memiliki isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo, yaitu :

1. Tingkat kemiskinan cukup tinggi utamanya pada kelompok usaha pertanian dan perikanan. (Kabupaten Gorontalo = 21,05% ; Provinsi Gorontalo =17,41%, *data Bagian Pemerintah Tahun 2016*)
2. Jumlah angka kematian ibu (AKI) masih cukup tinggi (297/100.000 lahir hidup)
3. Tingkat pengangguran mencapai 3,89%
4. Angkatan kerja masih didominasi tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD (22,54%)
5. Gini ratio sebesar 0,44

6. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun (Tahun 2010 = 39,82%, Tahun 2014 = 38,29%)
7. Rasio PAD terhadap APBD relatif rendah (8,5%)
8. Infrastruktur Perdesaan yang masih terbatas (indeks Kab. Gorontalo = 41,81 ; indeks Prov. Gorontalo 42,40)

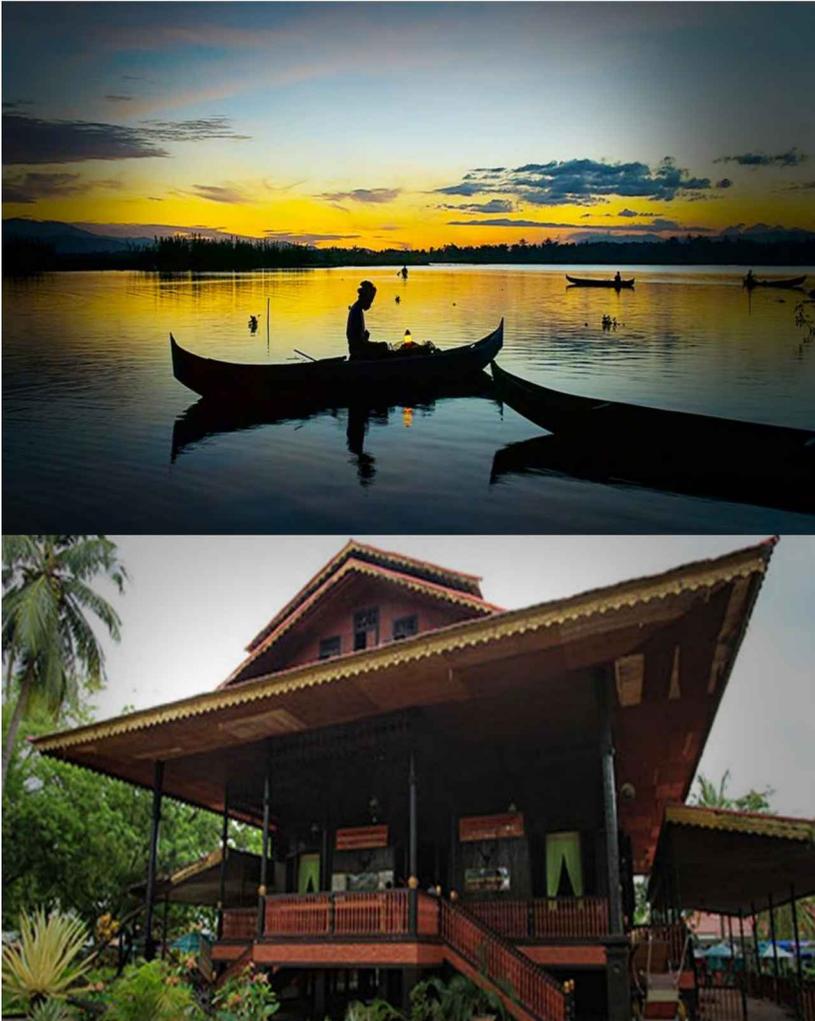
Isu-isu strategis tersebut kemudian diprogramkan dalam Program Unggulan "Nafas Cita", dengan sasaran : (1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (2) Pengembangan pertanian terpadu, (3) Pengembangan ekonomi kreatif, (4) Pembangunan infrastruktur, dan (5) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa



**Gambar 3. Menara Limboto di Kota Limboto, Ibukota
Kabupaten Gorontalo**

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa



Gambar 4. Potensi wisata Kabupaten Gorontalo, pemandangan alam Danau Limboto (atas) dan *banthayo poboide* rumah adat Gorontalo (bawah)

PROFIL BUPATI GORONTALO

A. Panggilan Jiwa Sang Profesor

Bupati bergelar professor mungkin hal yang langka di Indonesia. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita sering hanya terfokus pada para pemimpin yang di Jawa saja, hingga media sering melupakan bahwa banyak pemimpin di luar Jawa yang mempunyai prestasi luar biasa dan tak kalah dengan mereka yang sering muncul. Tengok saja Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Di kabupaten ini terdapat nama Nelson Pomalingo. Bupati bergelar profesor ini adalah bupati kedua yang bergelar profesor di Indonesia setelah Bupati Bantaeng,

Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah
M.Agr.

Pria bernama lengkap Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo M.Pd adalah Bupati Gorontalo periode 2016-2021 yang merupakan satu-satunya bupati dan yang pertama di Kabupaten Gorontalo, bahkan mungkin di Provinsi Gorontalo.

Sebelum merintis karir di dunia birokrasi, Nelson telah berkecimpung di dunia pendidikan. Pria empat orang anak ini merupakan guru besar sekaligus mantan Rektor di Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Sebuah pencapaian yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo, karena dipimpin oleh seorang bupati bergelar professor. Tidak banyak daerah, yang pemimpinnya memiliki level intelektual sekelas itu.

Hebatnya lagi, baru-baru ini bupati Nelson ditunjuk langsung sebagai ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Koordinator Nasional Koalisi Pemerintah Kabupaten Pemerhati Kelapa, dan juga

sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPW-PPP Provinsi Gorontalo.

Dalam banyak hal, Nelson memang terbukti lebih unggul, baik dalam bidang sosial dan juga bidang politik. Malah, di bidang ekonomi pun Nelson sangat piawai. Tak heran baru 2 tahun memimpin, Kabupaten Gorontalo telah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen pertahunnya, sehingga mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, terutama dari Kementerian RI.

Jika sebelumnya Nelson mendapatkan kehormatan menjadi profesor di Universitas yang ada di Gorontalo, memanglah sudah sangat layak. Dengan gelar ini, maka Nelson Pomalingo menjadi Bupati pertama yang ada di Kabupaten Gorontalo bahkan se Provinsi Gorontalo yang bergelar profesor. Sebelumnya, belum ada Bupati/Walikota yang bergelar professor di Gorontalo. Semoga menjadi pertanda baik bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo dan menjadi contoh bagi pemimpin lain di Indonesia, bahwa menjadi pembelajar itu tiada akhir, bahkan setelah berada di posisi puncak sekalipun.

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa



**Gambar 5. Bupati Gorontalo
Prof. Dr. H. Nelson Pomalingo, M.Pd**

B. Sang Konseptor Masa Kini dan Masa Datang

Setelah meraih gelar Insinyur Pertanian di Universitas Samratulangi Manado, Nelson memilih pulang ke kampung halamannya menjadi guru di sekolah Pertanian di Limboto. Dalam mengemban tugas mulianya sebagai guru ketika itu, lagi-lagi Nelson mampu menangkap peluang dan potensi Gorontalo dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian yang berada di Kelurahan Huangobotu Kec. Dungingi sekarang. SMK Pertanian yang dibangun dan dirintis oleh seorang Nelson tersebut telah membangunkan dan membangkitkan ruh, spirit dan menjadi sumber inspirasi bagi pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis kawasan.

Keinginan rakyat lainnya yang berhasil dipersembahkan oleh seorang Nelson adalah pada saat ia dipercaya oleh penjabat Gubernur Tursandi Alwi menjadi Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo pertama. Ketika itu Penjabat Gubernur Tursandi Alwi memuji kehebatan Nelson yang dalam waktu singkat berhasil menyusun

APBD mini, menyusun RT/RW Gorontalo dan menyusun Grand Strategi pembangunan Gorontalo jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Nelson dengan begitu merupakan sosok yang telah menyusun konsep dasar yang menjadi arah pembangunan atau telah bertindak sebagai Konseptor pembangunan masa depan Gorontalo. Tidak heran jika dalam perjalanannya, Nelson termasuk sosok pemimpin yang terbilang kecewa dengan pembangunan saat ini yang tidak jelas arahnya.

Demikian pula dengan impian, keinginan dan aspirasi rakyat Gorontalo melahirkan pendidikan yang berkualitas melalui program peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru tidak terlepas dari perhatian dan sentuhan tangan dan kecerdasan seorang Nelson yang sejak tahun 2002 dipercaya sebagai Ketua PGRI Provinsi Gorontalo. Ditengah kesibukannya sebagai Rektor, Nelson masih menyempatkan waktunya untuk menemui guru hingga ke pelosok-pelosok desa, menampung dan menyerap aspirasi guru. Keseluruhan aspirasi Guru tersebut selanjutnya ia suarakan di tingkat pusat baik melalui moment Rakor, Rakernas, dan Konkerpim PGRI

maupun dalam berbagai audiensi dengan Presiden dan Kementerian Pendidikan.

Keikutsertaan dan peran aktif PGRI Gorontalo di tingkat pusat sangat dihargai dan diapresiasi oleh PB PGRI semisal keikutsertaan delegasi PGRI Gorontalo dalam memperjuangkan Undang-Undang Guru dan Dosen maupun dalam mendukung gugatan PGRI terhadap Pemerintah di Mahkamah Konstitusi terkait tuntutan anggaran 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas. Tidak heran pula jika di era kepemimpinan Nelson, PGRI Gorontalo termasuk organisasi terbaik di tingkat nasional.

Kiprah Nelson di tingkat pusat sangat meyakinkan dan didengar oleh pengambil kebijakan di tingkat Nasional, karena Nelson termasuk deretan Pengurus PGRI yang tidak biasa, ia adalah Guru Besar yang disegani oleh para pengambil kebijakan baik di Kementerian Pendidikan Nasional maupun di jajaran Pengurus Besar PGRI di Jakarta. Masih terkait dengan keberpihakannya terhadap nasib guru, Nelson ngotot melaksanakan program Sertifikasi guru di Gorontalo

untuk dipusatkan di UNG. Dengan kelihaihan dan argument yang sulit dimentahkan, Kementerian Pendidikan akhirnya menunjuk UNG sebagai pelaksana sertifikasi guru di Gorontalo. Permintaan Nelson agar guru Gorontalo disertifikasi di UNG lebih didasari oleh keinginan tulus Nelson untuk membantu guru di Gorontalo agar tidak harus ke Manado untuk mengikuti sertifikasi. Bisa dibayangkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh guru dari Gorontalo jika harus mengikuti sertifikasi di Manado ketika itu.

Ketulusan Nelson untuk membela guru di Gorontalo ketika itu telah membawa petaka bagi Nelson sendiri yang ketika itu dituding melakukan penyelewengan dana PLPG yang menyeretnya menginap di Penjara selama 2 hari lamanya. Bersyukur, berbagai tudingan itu ternyata tidak terbukti, Nelson diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Gorontalo yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung bahwa Nelson tidak bersalah.

Masih dalam upaya keberpihakannya terhadap Guru, Nelson ternyata begitu peka dan kritis terhadap

kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, tahun 2010 lalu misalnya Kementerian Pendidikan mengeluarkan Surat Keputusan yang membebankan anggaran sertifikasi ditanggung oleh guru yang menjadi peserta sertifikasi. Keputusan ini ditentang oleh PB PGRI dan daerah pertama yang menyuarakan dan tidak setuju dengan Keputusan itu adalah PGRI Provinsi Gorontalo. Alasannya adalah, guru tidak mampu dan pasti terbebani jika harus mengeluarkan uang jutaan untuk mengikuti sertifikasi guru. Dengan desakan PGRI tersebut, akhirnya Mendiknas membatalkan dan merevisi keputusannya dengan membebankan biaya sertifikasi guru kepada Negara.

Sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Gorontalo, lagi-lagi Nelson terus berjuang dengan penuh kesahajaan mempersembahkan karyanya untuk rakyat Gorontalo. Selama tahun 2010 hingga 2011 ini, melalui organisasi Dewan Mesjid Nelson memelopori kegiatan pelatihan kepada para ta'mirul Mesjid, Khatib dan Imam di Provinsi Gorontalo. Targetnya adalah melahirkan tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat

khususnya ta'mirul Mesjid yang berkualitas di daerah ini. Dengan demikian, Ta'mirul Mesjid mampu menyelenggarakan kegiatan keagamaan sesuai tuntunan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW.

Demikian pula sebagai Ketua Dewan Pembina Abang Bentor Gorontalo, Nelson Pomalingo mulai menelurkan berbagai ide terutama untuk peningkatan kesejahteraan Abang Bentor di daerah ini yang mencapai ribuan jumlahnya. Menurut Nelson kedepan harus ada upaya dan keberpihakan kepada abang bentor agar kehidupan mereka benar-benar sejahtera. Untuk itu Nelson bertekad untuk tahap pertama akan merealisasikan Koperasi khusus bagi abang bentor Gorontalo sebagai wadah perekonomian abang bentor Gorontalo. Paling tidak kata Nelson Koperasi, menjadi "dewa penolong" jika sewaktu-waktu ada kepentingan mendadak yang harus dipenuhi oleh abang Bentor.

Nelson Pomalingo, Sosok Sederhana Bupati Gorontalo, Rela Tinggal di Indekos

Prof. Dr. Ir. H Nelson Pomalingo, MPd., Lahir di Limboto, 24 Desember 1962. Nelson Pomalingo berasal dari keluarga dengan latar belakang guru dan merupakan anak sulung dari pasangan Soekarno Pomalingo dan Hj Neli Tulie.

Nelson Pomalingo menjabat Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) selama dua periode 2002—2010, lalu menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo periode 2012—2016. Terpilih dan dilantik sejak 17 Februari 2016, Nelson Pomalingo merupakan Bupati Ke-12 dari Kabupaten Gorontalo sejak berdiri pada tahun 1959

Dilansir dari MCB.Com, Bupati petahana yang menyelesaikan studi doktoral di IKIP Negeri Jakarta ini, konon, setiap pergi keluar daerah (Jakarta) untuk mengikuti berbagai acara maupun memperjuangkan kepentingan daerah, ia lebih memilih ikhlas tinggal di indekos. Ia tidak menggunakan fasilitas hotel, meskipun halal baginya menikmati fasilitas tersebut.

Padahal, fasilitas yang disediakan telah dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. Juga menyangkut fasilitas pesawat, Nelson lebih memilih duduk di kelas ekonomi ketimbang mengambil tempat duduk di kelas bisnis.

Mungkin sosok pria dengan 4 (empat) orang anak ini hanya ingin pencitraan agar mengundang simpati publik. Asumsi itu bisa saja benar dan bisa juga salah. Buktinya, hingga kini sikap rendah hati Nelson tersebut tidak terpublis di media massa.

Lantas, apa alasan Nelson memilih tinggal di indekos? Suami dari Fory Naway ini sedikit memberikan alasan yang

mengundang rasa empati. “Bagi saya, jabatan ini hanya sementara yang pasti akan kita tinggalkan,” kilah Nelson

Dengan tinggal di indekos atau memilih tempat duduk (pesawat) kelas ekonomi kata Nelson, maka akan menghemat keuangan daerah. “Ketika jabatan itu kita tinggalkan, pasti kita akan terbiasa dan tidak kaget. Saya tidak mau terjadi post power syndrome,” terang Nelson sedikit tersenyum.

Deklarator pembentukan Provinsi Gorontalo ini mengurai, anggaran untuk tinggal di hotel tersebut sebesar Rp 8 juta, namun karena memilih tinggal di indekos, Nelson hanya mengeluarkan anggaran Rp 3 juta rupiah setiap bulan. “Di kos-kosan saya lebih nyaman. Semua saya kerjakan sendiri, termasuk seterika baju sendiri. Tidak ada pembantu. Walhasil, saya senang dan menikmatinya,” urai Nelson.

<https://gardaindonesia.id/2019/06/15/nelson-pomalingo-sosok-sederhana-bupati-gorontalo-rela-tinggal-di-indekos/>

C. Sang Bupati Sarat Prestasi

Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. H Nelson Pomalingo, M.Pd merupakan sosok pemimpin yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam membangun serta memajukan daerah. Berbagai penghargaan dari berbagai lembaga dan organisasi diberikan kepada Nelson Pomalingo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Penghargaan untuk Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo

1. Penghargaan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT). Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menerima penghargaan dari (PNKT) bersama tujuh orang Gubernur dan 35 Bupati dan Wali Kota se Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan.
2. Penghargaan Anugerah Dana Rakca 2016. Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, meraih penghargaan Anugerah Dana Rakca 2016 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), karena dianggap berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Penghargaan Parahita Ekapraya. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini terkait prestasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo atas penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR).
4. Penghargaan Best Communicators 2017 dari PR Indonesia. Bupati Gorontalo menerima penghargaan dari PR Indonesia, salah satu majalah nasional sebagai *Indonesia Best Communicators 2017* untuk kategori Bupati. Penghargaan ini diserahkan oleh Komisaris Utama PR Indonesia di Hotel Grand Kaisha Jogyakarta yang diterima oleh Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Gorontalo, Rachmad Mohamad.

5. Penghargaan 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2017. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menerima penghargaan Top 99 Inovasi layanan publik tahun 2017 atas inovasi MP-TGR. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada acara penutupan gelar pameran dan simposium pelayanan publik Jawa Timur tahun 2017, di Gelora Joko Samudro Kabupaten Gresik
6. Penghargaan dari BPK RI. Penghargaan dari BPK RI ini terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A 2016 setelah pada tahun sebelumnya juga menerima penghargaan terhadap opini WTP terbaik se Provinsi Gorontalo (WTP Plus) pada LKPD T.A 2015.
7. Penghargaan dari APTISI. Bupati Gorontalo menerima penghargaan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), atas kiprahnya dalam memberikan perhatian yang besar pada perguruan tinggi swasta (PTS).
8. Penghargaan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Gorontalo meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
9. Penghargaan Treasury Award untuk kategori Pemerintah Daerah Dengan Pelaporan Keuangan Terbaik Tahun Anggaran 2016 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

10. Penghargaan “Paramesti” dari Kementerian Kesehatan. Sukses menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) , Bupati Gorontalo menerima penghargaan “Paramesti” dari Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada pertemuan Aliansi Bupati dan Walikota Peduli KTR dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), di Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Peringkat kedua Kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Regional Sulawesi. Setelah mempertahankan WTP Ke-7 yang merupakan bentuk pernyataan sikap dari pihak BPK-RI selaku pemeriksa atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik, Kabupaten Gorontalo dinobatkan sebagai peringkat kedua Regional Sulawesi Kategori Transparansi pengelolaan keuangan daerah terbaik dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
12. Penghargaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Komitmen Kerjasama dan berjasa dalam membangun Kepolisian Negara RI. Komitmen Kerjasama dan berjasa dalam membangun kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana Sekolah Polisi Negara (SPN) Kepolisian Daerah Gorontalo.
13. Penghargaan LPPD 2016 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima penghargaan Menteri Dalam Negeri atas prestasi kinerja ‘sangat tinggi’ dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016.

14. Penghargaan Top Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD Kabupaten Gorontalo dinilai masuk dalam kategori baik. Penilaian ini dari Majalah Business News Indonesia, bekerjasama dengan Asia Business Research Center, serta beberapa lembaga Tim Penilai seperti SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman dan Associate, Harvard-Intellectual Business Community, dan Alvara Strategi Indonesia. Penilaian tersebut sebelumnya sudah diseleksi dari lebih 2.000-an BUMD di seluruh Indonesia.

<https://humaskabgor.wordpress.com/2018/05/10/profil-jejak-prof-nelson-sang-konseptor-masa-kini-dan-masa-datang/>

SPIRIT MEMBANGUN GERAKAN NDP

A. Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) : Pelayanan, Aspirasi dan Evaluasi

Jauh sebelum istilah “blusukan” populer ketika Joko Widodo, saat menjadi Walikota Solo dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, melakukan kunjungan langsung ke masyarakat di kampung-kampung, Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo juga telah “blusukan” ke desa-desa. Dua Bupati sebelum Bupati Nelson Pomalingo telah memulai tradisi blusukan ini di Kabupaten Gorontalo.

Pada awal masa jabatannya, Nelson pun melakukan hal tersebut. Namun pada tahun ketiga masa

jababatannya, Nelson berinovasi, bukan hanya berkunjung ke desa-desa, namun juga tinggal beberapa hari di desa-desa. Kemudian muncullah Gerakan Nyata dalam Pembangunan (GNP), dimana Bupati bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholders* terkait berakhir pekan dan menginap di desa-desa.

“Program NDP kami laksanakan selain untuk memberikan pelayanan publik hingga ke masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa, menyerap aspirasi masyarakat, juga dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah kecamatan dan desa serta evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan oleh Pemerintah” jelas Nelson. “Dari pelaksanaan Program NDP ini, kami dapat mengetahui secara riil kebutuhan masyarakat, di sektor pertanian misalnya terkait kebutuhan bibit, jaringan irigasi, dll” lanjut Nelson.

Karena dilaksanakan bergiliran ke setiap kecamatan selama 19 minggu sesuai jumlah kecamatan,

maka Gerakan NDP lebih dikenal dengan program *nomaden*, istilah yang menggambarkan rombongan komunitas yang berpindah-pindah tempat tinggal. Kegiatan ini membawa dampak ekonomi bagi warga, karena rombongan besar ini pasti akan berbelanja di desa tempat menginap yang tentu saja akan menghidupi para pedagang dan pelaku ekonomi di desa.

Pada hari Jumat dinihari, rombongan Bupati bergerak menuju suatu kecamatan. Kegiatan diawali dengan shalat Subuh berjamaah dilanjutkan dengan ceramah agama oleh ulama setempat. Pagi harinya, kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus melakukan evaluasi terhadap program-program pembangunan di Kabupaten Gorontalo. Bupati Nelson dengan sabar mendengarkan aspirasi, keluhan, dan harapan warganya.

Apabila bisa diselesaikan langsung, maka Nelson akan meminta aparaturnya terkait untuk menangani, namun apabila tidak bisa diselesaikan langsung maka Nelson akan menyelesaikannya dalam kesempatan pertama. Sedangkan apabila yang muncul usulan program-

program pembangunan, Nelson akan mengkaji dan memasukkannya dalam rencana pembangunan berikutnya. "Setiap aspirasi saya tindaklanjuti, saya akan turun kembali pada kesempatan lain untuk melihat hasil dari tindaklanjut tersebut" kata Nelson.

Beberapa OPD kemudian memberikan pelayanan langsung, seperti pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pelayanan akseptor Keluarga Berencana, pelayanan inseminasi buatan oleh Dinas Peternakan, pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit setempat, dan pelayanan lainnya sesuai kebutuhan. Pelayanan ini mendapat sambutan hangat dari warga masyarakat, karena mereka tidak perlu ke Kota Limboto atau ke tempat lain untuk mendapatkan pelayanan.

Pada hari yang sama atau hari berikutnya, Nelson akan mengunjungi semua desa yang ada di kecamatan tersebut. Pada saat menginap, Nelson menyempatkan bertemu dengan para pemuda karena para pemuda ini memiliki aspirasi, keluhan dan harapan. Mereka butuh

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

didengarkan, juga perlu diarahkan, karena pemuda memiliki semangat yang tinggi untuk berpartisipasi.



**Gambar 6. Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo,
bertemu masyarakat di Kecamatan Tolangohula pada
acara GNP tanggal 15 November 2019**

Menurut Nelson, "dengan Program NDP kami juga dapat mengetahui berbagai Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk kami dukung dan dorong untuk dikembangkan". Hal ini sejalan dengan amanah UU Desa yakni memfasilitasi terciptanya desa-desa di Indonesia yang demokratis, mandiri dan sejahtera.

B. Spirit Membangun Gorontalo dengan Tiga Pilar

Sesuai dengan ajaran agamanya, agama Islam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hal inilah menjadi pegangan bagi Nelson Pomalingo dalam memimpin Kabupaten Gorontalo, yaitu bagaimana menjadi pemimpin yang memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi warganya.

Selain ajaran agama Islam, Nelson juga memegang teguh falsafah hidup masyarakat Suku Gorontalo, yaitu :

- *Aadati hula-hula to sara', sara' hula-hula to Kuru'ani* (Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Quran)
- *Mohuyula* (Bergotong royong)
- *Mopotuwawu kalibi, kauli, wawu pi'ili* (Menyatukan hati, perkataan, dan perbuatan)
- *Batanga pomaya, nyawa podungalo, harata potombulu* (Jasad membela tanah air, jiwa dipertaruhkan, harta bagi kemaslahatan orang banyak)
- *Lo Iya Lo Ta Uwa, Ta Uwa Lolojiya, Bo'odila Polusia Hilawo* (Pemimpin itu penuh dengan kewibawaan, maka tidaklah dirinya sewenang-wenang)

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, dalam membangun daerah dibutuhkan konsep strategi yang berbasis pada tiga pilar, yakni : (1) agama, (2) ilmu dan (3) budaya atau Adat. Dengan tiga pilar tersebut, maka daerah akan menjadi bangunan yang kokoh bagi

masyarakat untuk bernaung meraih kemajuan yang berperadaban.

Ketiga pilar tersebut menurut Nelson, dapat dihayati oleh seluruh unsur di masyarakat, terutama aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Dengan agama, maka aparatur pemerintahan dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai suatu amal ibadah yang tidak mengharapkan imbalan apapun, melainkan karena mengharapkan ridha Allah SWT. Dengan pilar agama pula, tercermin sikap yang senantiasa ikhlas dalam bekerja karena bersandar pada hakekat manusia di muka bumi yang harus beramal, beribadah dan bermuamalah. Dalam implementasinya, pilar keagamaan ini diwujudkan melalui program-program penguatan berupa bantuan untuk Mesjid, menggalang kegiatan keagamaan di masyarakat, bantuan untuk pesantren dan sekolah yang terus disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Tidak cukup sampai disitu saja, untuk mengemban tugas dalam membangun daerah dibutuhkan seperangkat

ilmu pengetahuan sebagai sebuah ikhtiar meraih keberhasilan dalam bekerja. Oleh karena itu menurut Bupati, setiap individu di masyarakat, harus mampu mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi keilmuan melalui usaha serta kemauan untuk mengeksplorasi perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat ilmu, seseorang dapat terus berkembang melalui kreatifitas, inovasi dan senantiasa menjadi teladan dan menginspirasi orang lain. Hal itu perlu menjadi fokus perhatian dunia pendidikan di Kab. Gorontalo, yakni bagaimana menjalani proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah yang bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tidak kalah pentingnya adalah pilar ketiga, berupa adat dan budaya yang harus diresapi dan dihayati oleh siapapun. Menurut Bupati Nelson, dalam membangun daerah, pendekatan budaya sangat penting untuk memberikan penguatan-penguatan atas program yang tengah dilaksanakan. Gorontalo sebagai daerah adat di Indonesia memiliki khasanah kekayaan budaya yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo. semua itu dapat

diresapi dan dihayati oleh seluruh masyarakat sehingga kekayaan budaya itu mampu memberikan penguatan terhadap percepatan kemajuan dan peradaban Gorontalo secara keseluruhan.

Dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak contoh, betapa daerah yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya daerahnya, mampu mencapai kemajuan dengan percepatan yang sungguh signifikan. Sebagai contoh adalah Provinsi Bali, dimana masyarakat Bali selama ini konsisten mempertahankan adat dan tradisi leluhur, tidak hanya dalam bentuk seremonial, tapi merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan sehingga nilai-nilai budaya itu menjadi spirit untuk maju. Demikian juga dengan dengan Kota Jogjakarta, Solo dan daerah lainnya yang justru mengalami percepatan kemajuan karena masyarakatnya mampu mempertahankan nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Itulah sebabnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan perhatian khusus terhadap aspek budaya dalam kehidupan masyarakat, sebagai salah satu instrumen penting dalam

memberikan penguatan terhadap percepatan kemajuan di Kabupaten Gorontalo.

C. Kepemimpinan dengan Tiga Dimensi Keluhuran Budi

Membangun suatu daerah membutuhkan komitmen kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Ikhlas adalah derajat tertinggi dari sebuah gerakan amaliah bagi sesama. Itulah prinsip kepemimpinan Prof. Nelson Pomalingo selama ini yang terus terpatuhi, baik ketika masih menjabat Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG) maupun ketika memimpin puluhan organisasi di Gorontalo.

Atas dasar kerja ikhlas itulah, terkadang banyak yang berada di sekitar dan di sekelilingnya sekalipun, tidak mengetahui sepak terjang Prof. Nelson yang terus menuai apresiasi dan pujian dari berbagai kalangan. Jika saja, terobosan dan visi Bupati Nelson Pomalingo yang mencetuskan gagasan "Mengembalikan Kejayaan Kelapa di Indonesia" yang mampu menyatukan ratusan Bupati

penghasil Kelapa di Indonesia, selanjutnya diakomodir oleh pemerintah pusat sebagai program nasional, teretus dari pemimpin lain di daerah ini, mungkin saja, setiap saat diangkat dan terus disiarkan dengan tidak henti-hentinya di media lokal dan nasional demi sebuah citra.

Tapi tidak demikian dengan Bupati Nelson Pomalingo. Yang terpenting bagi sosok Deklarator Provinsi Gorontalo ini, yang harus diseriusi adalah bagaimana program-program yang dicetuskannya membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. "Hasilnya, manfaatnya bagi masyarakat, itu yang penting. Gagasan adalah ibarat wadah atau tempat, maka yang terpenting, mengisi wadah itu dengan muatan yang dapat dimanfaatkan, bukan tentang wadah itu yang terus digaungkan" tandas Bupati Nelson suatu ketika.

Itulah sisi positif dari seorang pemimpin yang memiliki ruh sebagai "Cendekiawan" yang menempatkan dirinya, karya dan pengabdianya, bukan untuk dirinya, tapi membawa manfaat untuk orang lain. Hal itu sejalan

dengan apa yang pernah dikatakan Ali Syariati bahwa “kerajaanmu yang sesungguhnya bukan di bumi” yang mengandung pengajaran tentang hakekat Ikhlas yang tidak harus dipetik di alam dunia ini, tapi menjadi sebuah amal yang dipersiapkan di alam kehidupan yang hakiki. Itulah sebabnya, mengapa sikap Bupati Prof. Nelson Pomalingo selama ini yang terus saja bekerja dan berkiprah ditengah-tengah hiruk-pikuk kritik yang terus menghujannya.

Ketika mendapatkan penghargaan, meraih apresiasi dan pujian, melakukan dan menggagas berbagai karya-karya monumental untuk kepentingan orang banyak, bagi seseorang yang telah meraih derajat Ikhlas, semua itu tidak membutuhkan sensasi, pujian dan apresiasi yang berlebihan. Baginya, dampak positif apapun yang ditimbulkan dari perbuatan baik, memang baik bagi kemanusiaan, tapi esensinya adalah sebagai amal semata. Itulah sebabnya, kepemimpinan Prof. Nelson Pomalingo selama ini adalah ditopang oleh 3 dimensi keluhuran budi, yakni *ilmiyah*, *amaliyah* dan *akhlaqiyah*.

D. Meningkatkan Kinerja ASN dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Gorontalo maka sangat dibutuhkan komitmen dan dukungan birokrasi, serta dukungan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Masalah yang banyak dikeluhkan Pemerintah Daerah pada era desentralisasi ini adalah rendahnya komitmen dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai birokrat yang memberikan pelayanan pembangunan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati Nelson Pomalingo mencanangkan 2018 sebagai Tahun Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai upaya memmanifestasikan semangat itu, seluruh ASN berikrar melalui "Deklarasi Kebulatan Tekad" yang berisi : (1) Berdiri tegak, sejajar serta merapatkan barisan mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo, (2) Merajut sinergitas kinerja, memperkuat kerjasama eksternal, meningkatkan daya

cipta inovatif serta meningkatkan tata kelola birokrasi yang taat azas dan taat etika, (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kemitraan *triple helix*, menuntaskan tujuh isu strategis daerah serta mendorong sebuah tatanan pemerintahan yang dinamis, visioner dan produktif.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ASN, Bupati Prof. Nelson Pomalingo tidak hanya sekadar melakukan himbauan dan menebar harapan, tapi juga berupaya keras untuk melakukan upaya-upaya konkrit, diantaranya menciptakan sebuah sistem yang dapat mendorong terbangunnya kinerja yang maksimal di kalangan ASN. Itulah sebabnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melahirkan terobosan baru, berupa menciptakan Sistem Insentif Kinerja Aparatur Pemerintah (SIKAP), yakni sebuah sistem yang mampu mengukur kinerja ASN untuk selanjutnya menjadi standar bagi ASN dalam memperoleh penghargaan bagi yang berkinerja baik dan hukuman bagi yang berkinerja tidak baik. Dengan sistem ini diharapkan, ASN di Kabupaten Gorontalo dapat

termotivasi untuk bekerja dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Selain itu, mulai tahun 2018, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada para ASN, yakni 25 persen dari jumlah penghasilan yang diterima pada tahun sebelumnya. Sementara itu, khusus untuk pegawai non ASN, Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 milyar untuk meningkatkan kesejahteraan non ASN atau naik hampir 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp. 1.2 Milyar.

Untuk mendorong kinerja ASN, Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo juga senantiasa melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sidak ini, dilakukan untuk melihat sejauhmana tingkat kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas keseharian di masing-masing instansi serta melihat dari dekat kondisi kantor maupun kesiapan sarana dan prasarana kantor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Juga, pada awal tahun 2018, Bupati Nelson mencanangkan program

Ten Go Gesit, yakni program untuk memacu semangat, komitmen dan dedikasi ASN agar tampil cekatan dan gesit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kab. Gorontalo selama ini termasuk pemerintahan yang berbasis inovatif, visioner dan memiliki seperangkat strategis untuk percepatan pembangunan di Kab. Gorontalo. Terutama yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang tidak semata-mata mengandalkan dana APBD, melainkan melakukan dan mengorbitkan terobosan-terobosan yang melibatkan lembaga-lembaga lain, seperti pihak Perbankan untuk memberikan penguatan terhadap keberhasilan program pemerintah. Sebagai gambaran, Pemerintah Kab. Gorontalo pada 2018 berhasil menandatangani kerjasama (MOU) dengan Bank SulutGo untuk penyaluran kredit bagi peternak dan menjalin kerjasama dengan Bank BRI untuk memberikan penguatan terhadap pengembangan sektor pertanian dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, Pemerintah Kab. Gorontalo terus mendorong peningkatan investasi di daerah, salah satunya menjalin kemitraan

dengan perusahaan-perusahaan multi nasional. Disisi lain, pemerintah Daerah juga mengeluarkan diregulasi-diregulasi yang mempermudah masuknya investor di daerah ini. Tidak heran jika pada 2018, nilai investasi di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan, yakni menembus angka Rp. 1.2 Trilyun yang sebagian besar bergerak di bidang industri yang berbasis pertanian.

Yang patut diapresiasi lagi adalah upaya dan kerja keras Pemerintah Kab. Gorontalo yang terus melakukan lobi-lobi dan pendekatan dengan pemerintah Pusat untuk mengucurkan aliran dana ke Kab. Gorontalo. Bersyukur, upaya ini membuahkan hasil, diantaranya dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggaran pembangunan (APBD) di Kab. Gorontalo dari tahun 2017 yang hanya Rp. 1.2 Trilyun meningkat menjadi 1,5 trilyun pada semester pertama tahun 2018 atau mengalami peningkatan Rp. 300 milyar dan pada APBD-P meningkat lagi menjadi Rp. 1.6 Trilyun.

Semangat pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mempercepat pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Gorontalo yang berbasis kolaborasi ini, tidak hanya dalam

aspek pemberdayaan masyarakat, tapi juga mengakomodir serta menaruh perhatian terhadap kepentingan daerah untuk jangka panjang, terutama yang terkait dengan penanganan persoalan lingkungan hidup.

Bupati Nelson Pomalingo, sejak awal menyadari bahwa Kabupaten Gorontalo termasuk daerah yang rawan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, termasuk yang paling krusial adalah penanganan krisis Danau Limboto. Di sisi yang lain, Bupati juga menyadari sepenuhnya, bahwa untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kab. Gorontalo menggalang menjajaki kemitraan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor yang berskala nasional dan internasional yang selama ini bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup.

Terkait dengan upaya merangsang peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, Bupati Nelson menyadari bahwa sehebat apapun kepemimpinan dan pemerintahan, jika tidak

mendapatkan dukungan, peran dan partisipasi masyarakat, maka pemerintahan dan kepemimpinan akan berjalan di tempat.

Dari kesadaran inilah kemudian, Bupati Prof. Nelson Pomalingo melahirkan program dan kebijakan-kebijakan yang bertumpu pada bagaimana upaya pelibatan stakeholder dan masyarakat di perkotaan dan pedesaan untuk bersinergi dalam rangka membangun dan mewujudkan kemajuan bersama. Salah satunya adalah program *Integrated Farming System (IFS)* yakni program untuk mendorong terwujudnya sektor pertanian yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, yakni secara sederhana dapat diterjemahkan bahwa hasil-hasil pertanian dapat diolah dan dikembangkan atau diolah melalui, salah satunya industri rumah tangga yang melibatkan masyarakat. Dengan begitu, hasil-hasil produksi pertanian atau potensi alam lainnya dapat melahirkan produk-produk bermutu yang memberikan nilai tambah (*value added*) bagi masyarakat sebagai sumber penghasilan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program IFS ini, tidak hanya dalam aspek program yang terintegrasi tapi secara kelembagaan pemerintahan, juga terintegrasi dalam satu rangkaian kerja yang saling menunjang melalui koordinasi dan sinergitas.

Pemerintah Kab. Gorontalo juga melakukan program "Bedah Potensi Desa" yang diharapkan dapat melibatkan masyarakat dan akan bermuara pada terwujudnya keterlibatan masyarakat dalam menggarap segala bentuk potensi yang ada di desa melalui wadah ekonomi pedesaan, seperti halnya BUMDES. Juga Pemerintah Kab. Gorontalo melaksanakan Bursa Inovasi Desa (BID) sebagai salah satu wahana bagi pemerintah desa untuk mempromosikan hasil-hasil kreatifitas dan inovasi masyarakat desa.

Dalam pengembangan potensi desa menurut Bupati, Pemerintah Desa, lembaga-lembaga desa, karang taruna dan organisasi kepemudaan harus bersinergi untuk mengembangkan segala potensi yang ada. Minimal dalam penekanan Bupati adalah, jangan ada lahan kosong di desa, melainkan ada upaya dari Camat dan Kepala Desa untuk mendorong masyarakat melakukan

“Gerakan menanam” dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong agar menjadi produktif sehingga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat.

Nelson Berhasil Turunkan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo



Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, memberikan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Program ini menjadi salah satu pemicu menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. (Humas Pemkab Gorontalo)

Program pembangunan yang dilaksanakan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, berbuah hasil positif. Hal itu ditunjukkan

pada angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Selama empat tahun, 2015—2019, Nelson Pomalingo berhasil turunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo sebesar 3,74 persen.

Angka penurunan kemiskinan sebesar 3,74 persen ini dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo. Pada 2015, angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo tercatat sebesar 21,84 persen. Selanjutnya pada 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo menuru menjadi 18,06 persen.

"Selama 4 tahun kepemimpinan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, kemiskinan turun 3,74 persen. Penurunan kemiskinan terbesar terjadi pada rentang 2018-2019. Yaitu 1,78 persen," urai Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, Husain Duhengo, di sela Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 di Gedung Kasmat Lahay, Kamis (5/12/2019).

Dalam rentang 2018-2019, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo tercatat sebanyak 6.380 jiwa. Sementara itu untuk tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo 21,03 persen. Pada 2017 menurun menjadi 20,55 persen. Selanjutnya pada 2018 menjadi 19,84 persen.

"Data ini membuktikan selama kepemimpinan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, kemiskinan tidak naik turun. Akan tetapi turun terus," kata Husain Duhengo.

Menurut Husain, angka kemiskinan turun berkat kerja semua instansi. Baik Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), camat, kades, dan lurah. "Mereka bekerja sesuai aturan yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Pak Nelson. Ini adalah data resmi dari BPS dan tidak pernah diintervensi," tegas Husain.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Cokro Katili membenarkan, BPS Kabupaten Gorontalo sudah melayangkan surat resmi perihal perhitungan kemiskinan Kabupaten

Gorontalo 2019. Yakni sebesar 18,06 persen. Menurun dari presentasi penduduk miskin tahun 2018 sebesar 19,84 persen. “Tren penurunan yang konsisten selama 4 tahun ini menunjukkan fundamental indikator makro di Kabupaten Gorontalo semakin membaik,” kata Cokro.(**adm-02/gopos**)

<https://gopos.id/nelson-berhasil-turunkan-kemiskinan-di-kabupaten-gorontalo/>

MEMBANGUN EKONOMI DESA DARI EMBUNG WISATA

A. Profil Desa Dumati

Desa Dumati adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Desa ini berdiri pada abad ke-18, dengan penduduk yang berasal dari etnis Suwawa, Gorontalo dan Mindanau (Philipina). Nama desa Dumati sendiri berasal dari kata *Demato Wanggutolawa* dalam bahasa Suwawa, atau *Demato Wanggutilawa* dalam bahasa Gorontalo, yaitu ikrar persatuan ketiga etnis tadi.

Desa Dumati terletak 7 km dari Kota Limboto, Ibukota Kabupaten Gorontalo, dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Desa Ulapato B
- Sebelah Selatan : Desa Luhu
- Sebelah Timur : Desa Pilohayanga Barat
- Sebelah Barat : Desa Tuladenggi

Desa Dumati terdiri atas tiga Dusun yaitu Dusun I Hungayo, Dusun II Luwoo, dan Dusun III diberi Longgato. Desa Dumati memiliki wilayah seluas 1.100 Ha, yang terdiri dari lahan persawahan 300 Ha, lahan perkebunan 660 Ha, dan 140 Ha berupa pemukiman dan lain-lainnya.

Sebagian besar penduduk Desa Dumati bermata-pencaharian sebagai petani. Desa Dumati merupakan salah satu desa sentra pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Gorontalo. Komoditas unggulan Desa Dumati antara lain jagung, bawang merah dan cabai.

Penduduk Desa Dumati pada tahun 2016 berjumlah 1. 725 jiwa, terdiri dari 783 jiwa laki-laki dan 987 jiwa perempuan, dari 515 Kepala Keluarga. Hampir semua penduduknya memeluk agama Islam. Sebagai desa yang penduduknya berasal dari etnis yang berbeda,

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

terdapat potensi konflik di Desa Dumati. Pada tahun 2011 terjadi konflik antar penduduk sebagai eksekusi dari pemilihan Kepala Desa Dumati.



Gambar 6. Kantor Desa Dumati

B. BUMDes Mombungo Fokus Usaha Jasa Wisata

Ketika mulai menjabat sebagai Kepala Desa Dumati pada tahun 2015, Kasmin Hasan, mulai merealisasikan visi dan misinya untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Langkah awal yang dilakukan Kasmin adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dumati.

Peraturan Desa Dumati Nomor 5 Tahun 2015 mengamanatkan pendirian BUMDes di Desa Dumati, namun baru pada pertengahan bulan Desember 2015, berdiri BUMDes “Mombungo” Desa Dumati. Terpilih sebagai Direktur adalah Drs. Malik Badu, dengan Dewan Pengawas yang diketuai oleh Hi Iran Harun. Pemerintah Desa Dumati kemudian memberikan penyertaan modal Rp 100 juta dari Dana Desa tahun 2018, dan ditambah lagi Rp 300 juta dari Dana Desa tahun 2019.

Pada awalnya, usaha yang dijalankan BUMDes Mombungo adalah usaha perdagangan umum dan usaha pertambangan galian C. Sumber material galian C berupa pasir ini adalah di aliran irigasi di sekitar Embung Dumati. Embung ini mengalami pendangkalan akibat erosi dari

dua bukit yang mengapit Embung Dumati. Pada saat hujan material berupa tanah dan pasir mengalir ke embung.

Terinspirasi dari BUMDes yang sukses mengembangkan potensi wisata di daerahnya, seperti BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kabupaten Klaaten, Provinsi Jawa Tengah, yang berhasil menjadikan potensi kolam alami menjadi tempat wisata air, BUMDes Mombuango mencoba mengembangkan potensi embung yang ada di desanya menjadi tempat wisata.

Pembangunan obyek wisata ini juga terinspirasi dari spot-spot swafoto seperti di puncak Dulamayo. Spot foto di lahan hutan pendidikan milik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di Desa Dulamayo Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Letaknya yang tidak jauh dari Kota Gorontalo, di ketinggian tempat menikmati pemandangan Kota Gorontalo dan keindahan matahari terbenam, membuat tempat ini populer di media sosial.

Embung Dumati merupakan embung yang dibangun oleh pemerintah pusat dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo pada tahun 2007.

Pembangunan embung ini awalnya dimaksudkan untuk menampung air untuk irigasi, sekaligus juga untuk mengendalikan banjir yang sering terjadi di Desa Dumati dan sekitar Kota Gorontalo.

Embung ini dibangun diantara dua bukit, di tengah areal hutan rakyat. Pada saat itu letaknya terasa jauh dari desa karena tidak ada akses jalan menuju kesana. Pada tahun 2012 barulah dibuka jalan trans Sulawesi sehingga membuat Embung Dumati dapat dicapai dengan mudah dan dekat dengan pusat desa.

C. Embung Dumati, Kolaborasi Pengembangan Embung Wisata

Rencana pembangunan embung wisata Dumati pada awalnya tidaklah semudah yang direncanakan. Embung Dumati bukanlah asset milik desa, namun milik pemerintah pusat dalam hal ini BWS Sulawesi II. Tanah di sekitar embung seluas 4 hektar yang akan dikembangkan adalah milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan ada pula tanah milik pribadi (masyarakat). Untuk mengembangkan embung wisata,

tentu saja harus mendapatkan ijin dari para pemilik lahan tersebut.

Pada pertengahan tahun 2018, Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dakwah (KKD) XIV di Desa Dumati. UMGo kemudian memfasilitasi kolaborasi pembangunan wisata embung Dumati, antara BWS Sulawesi II selaku pemilik embung, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat selaku pemilik lahan, dan BUMDes Mombungo selaku calon pengelola embung wisata.

Para pihak kemudian memberikan ijin pemanfaatan embung dan lahan. BUMDes Mombungo mulai membangun infrastruktur, dan UMGo membantu desain wisata embung dan membuat konsep "Wisata Halal" yang akan menjadi pedoman pengelolaan wisata embung. Untuk pembangunan infrastruktur, BUMDes mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 juta.

Rencana pembangunan wisata embung ini mendapat sambutan yang baik dari warga Desa Dumati. Mereka berpartisipasi dengan ikut bergotong-royong membersihkan lahan, membuka jalan masuk, dan

kegiatan fisik lainnya. Mahasiswa KKD UMGo juga membantu membuat papan nama, dan penunjuk lokasi.





Gambar 6. Masyarakat Desa Dumati bergotong-royong membangun wisata embung

Pada tahap pertama, BUMDes Mombungo membangun spot-spot swafoto, gazebo dan lapak pedagang, perahu wisata, pondok di tengah embung, dan tempat parkir pengunjung. Pada akhir tahun 2018, pengerjaan infrastruktur telah dirampungkan. Akhirnya, bertepatan dengan pergantian tahun, pada tanggal 1 Januari 2019, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo meresmikan wisata embung Dumati.

"Saya memberikan apresiasi atas inisiatif masyarakat desa Dumati, khususnya bagi BUMDes yang

mengelola wisata embung itu. Patut diapresiasi karena ide ini bisa dirasakan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat sekitar,” kata Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo saat meresmikan wisata embung Dumati.

Embung Dumati yang semula hanya menjadi penampungan air di tengah hutan, hanya disinggahi oleh para pekebun, kini menjadi tempat wisata yang diminati warga Kota Gorontalo dan sekitarnya. Jaraknya yang dekat, hanya sekitar 20 menit dari pusat Kota Gorontalo melalui jalan trans Sulawesi, membuatnya banyak dikunjungi. Disamping itu, udara yang sejuk, pemandangan bukit yang hijau, dan tersedianya fasilitas penunjang, membuat tempat ini menjadi pilihan warga. Tidak perlu repot membawa makanan, karena di tempat ini banyak pedagang makanan, termasuk makanan khas Gorontalo *binte biluhuta* yang manis, pedas, dan asam, memberikan rasa segar yang nikmat.

Meskipun di sekitar hutan, namun jangan berbuat mesum di tempat ini, karena konsep yang dikembangkan adalah wisata halal yang ramah bagi pengunjung. Apabila pengunjung berlainan jenis duduk berduaan,

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

maka pengelola tidak akan segan untuk menegur. Sebagai tempat wisata halal, pengelola juga menyediakan tempat shalat dan wudhu. Semboyan “Wisata Halal tanpa minuman keras, judi, rarkoba dan perbuatan maksiat” juga memberi dampak kepada masyarakat setempat untuk mulai menghargai dirinya sendiri, dengan tidak menunjukkan perilaku yang tidak baik dihadapan para pengunjung.





Gambar 7. Pemandangan di area wisata embung Dumati

Untuk masuk ke lokasi wisata embung, pengunjung ditarik retribusi sebesar Rp 3000 per orang. Untuk menaiki perahu wisata, pengunjung membayar Rp 5000 per orang untuk satu putaran mengelilingi embung. Karena ketersediaan perahu masih terbatas, pengunjung rela antre untuk mendapatkan giliran berperahu mengelilingi danau.

Sampai dengan bulan September 2019, tempat wisata Embung Dumati telah dikunjungi 31.316 orang,

atau rata-rata pengunjung mencapai 3000 orang per bulan. Dari jumlah pengunjung tersebut, BUMDes Mombungo memperoleh pendapatan kotor Rp 120 juta, yang digunakan untuk membayar gaji karyawan dan pengembangan usaha.

Memperhatikan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat, maka pengelola akan terus melakukan pembenahan dan penambahan wahana baru. Wahana yang tersedia saat ini adalah perahu wisata, pondok apung, wahana swafoto di atas permukaan air, pondok di sekitar tanggul, jalan lingkar, dan tribun teduh di atas tanggul. Pada tahun 2020 direncanakan untuk membangun *flying fox*, kolam mini untuk anak-anak, penambahan wahana air, pembangunan toilet, kamar mandi dan ruang ganti, pembangunan tempat ibadah, pembangunan ruang pertemuan, dan penyiapan lokasi baru di puncak bukit Dumati.

Ke depan, BUMDes Mombungo akan membangun tempat penginapan (*homestay*) dan mengembangkan usaha jasa wisata dengan menyediakan angkutan wisata. Pengurus BUMDes membaca bahwa ke depan, berwisata

sudah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari gaya hidup (*lifestyle*), sehingga akan fokus pada jasa usaha wisata.

Spirit Membangun dari Gorontalo:
Gerakan Nyata dalam Pembangunan (NDP) dan Embung Wisata Desa

DAFTAR PUSTAKA

Anas, Abdullah Azwar, 2019. Anti-Mainstream Marketing:
20 Jurusan Mengubah Banyuwangi. Jakarta:
Gramedia